

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhannahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan selanjutnya kami kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihiwasallam.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mendasari hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang merupakan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program dan sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah semaksimal mungkin menyelesaikan seluruh kegiatan yang telah dianggarkan yang bersumber dari dana APBD, dimana hampir semua kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhannahu Wata'ala, kami mengharapakan laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kinerja di masa yang akan datang.

Muara Sabak, Desember 2024

KEPALA DINAS

IRWANTO, S. Sos

Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19701125 198912 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
1.1	Data Umum Organisasi	4
1.2	Struktur Organisasi	4
1.2.1	Bidang Tugas Dan Unsur – Unsur Dinas Perhubungan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
2.1	Rencana Strategis 2021 - 2026	15
2.1.1	Pernyataan Visi	15
2.1.2	Pernyataan Misi	16
2.1.3	Tujuan Strategis	16
2.1.4	Sasaran Program Tahun 2021 – 2026	16
2.2	Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
2.2.1	Struktur Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
	a. Perjanjian Kinerja Eselon II	19
	b. Perjanjian Kinerja Eselon III	20
	c. Perjanjian Kinerja Eselon IV	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1	Pengukuran Kinerja	28
3.2	Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV	PENUTUP	37
4.1	Kesimpulan	37
4.2	Saran	37

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. DATA UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6 serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi ;

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perhubungan yang diberikan oleh Bupati.

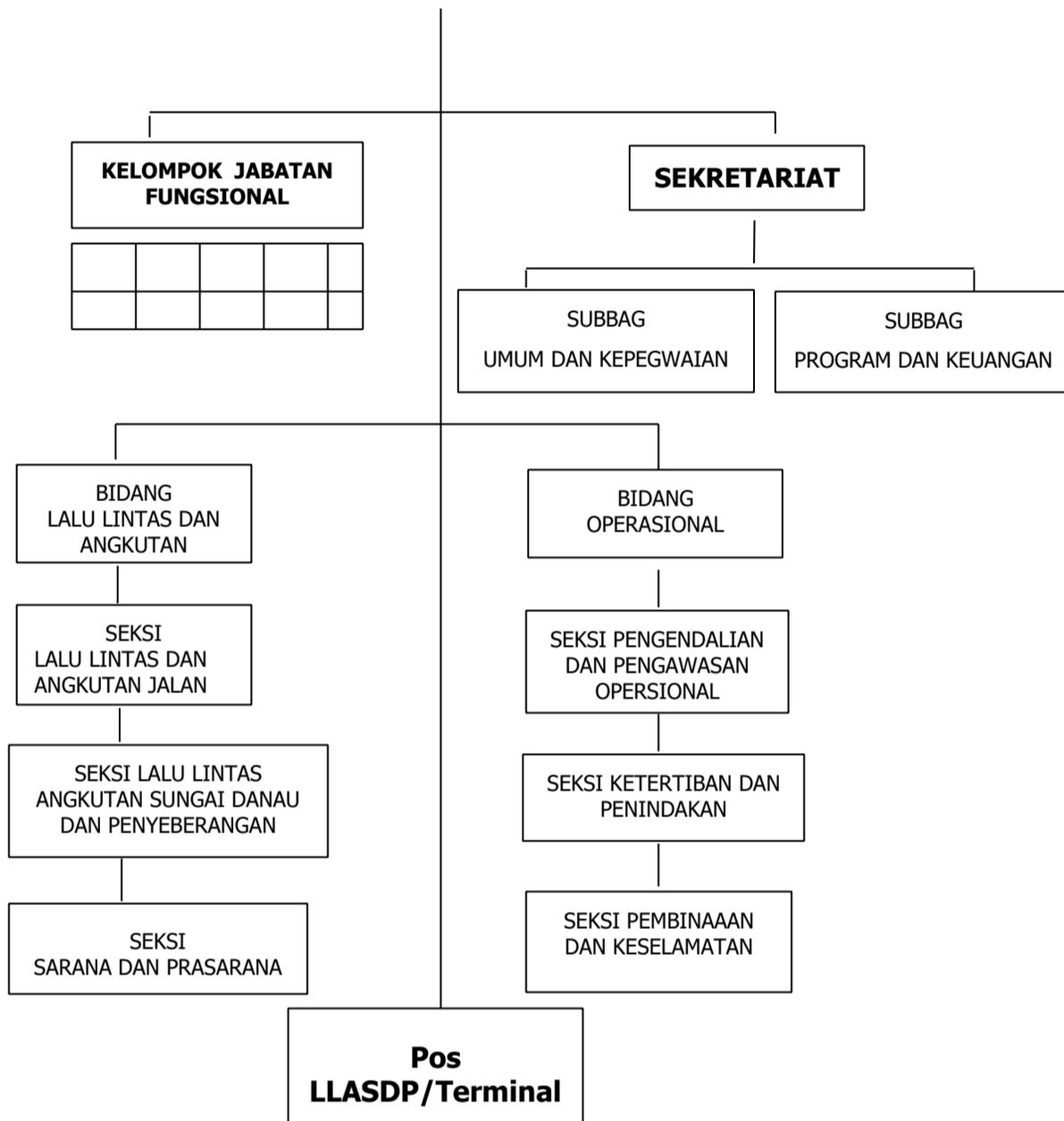
1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari ;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas;
 - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - Seksi Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Operasional, terdiri atas;
 - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Operasional;
 - Seksi Ketertiban dan Penindakan; dan
 - Seksi Pembinaan dan Keselamatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJAB TIMUR

KEPALA DINAS



1.2.1. Bidang Tugas dan Unsur – Unsur Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi:

Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretaris Dinas

Tugas dan Fungsi:

Membantu Kepala Dinas di dalam melaksanakan tugas di bidang umum, kepegawaian dan keuangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pengelolaan urusan umum.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi :

Membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian dengan tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pension pegawai di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan systemi nformasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas;dan
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Dari data kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 24 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebanyak 25 orang, terjadi penurunan jumlah pegawai pada tahun anggaran 2024 sebanyak 1 orang, karena adanya mutasi pegawai.

Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan seperti yang terdapat pada Tabel 1.1 dan berdasarkan jabatan seperti yang terdapat pada Tabel 1.2

TABEL 1.1
JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJAB TIMUR
PER 31 DESEMBER 2024
BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
01.	IV.D	0 Orang
02.	IV.C	1Orang
03.	IV.B	0 Orang
04.	IV.A	3Orang
05.	111.D	6Orang
06.	111.C	0Orang
07.	111.B	4Orang
08.	111.A	3Orang
09.	11.D	3 Orang
10.	11.C	3 Orang
11.	11.B	0Orang
12.	11.A	1Orang
13.	1.D	0 Orang
14.	1.C	0 Orang
15.	1.B	0 Orang
16.	1.C	0 Orang

TABEL 1.2
JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJAB TIMUR
PER 31 DESEMBER 2024
BERDASARKAN JABATAN

NO	ESELONERING	JUMLAH
01.	1	0 Orang
02.	I1.B	1Orang
03.	111.A	1Orang
04.	1II.B	2 Orang
05.	IV.A	6Orang

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas dan Fungsi :

Membantu sekretaris melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan, yang menjalankan fungsi sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan, dengan uraian fungsi sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
 - b. Pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian, jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 daerah dan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian;
 - c. Pelaksanaan perlengkapan jalan, rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan;
 - d. Pelaksanaan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah;
 - e. Pelaksanaan penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 daerah;
 - f. Pelaksanaan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan;
-

- g. Pelaksanaan penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan;
 - h. Pelaksanaan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
 - i. Pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan Kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
 - j. Pelaksanaan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur keretaapi khusus yang jaringannya dalam daerah;
 - k. Pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - l. Pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - m. Pelaksanaan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan dan / atau jaringan jalur kereta api dan untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
 - n. Pelaksanaan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang – orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
 - o. Pelaksanaan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;
 - p. Pelaksanaan penetapan tariff angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah;
 - q. Pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
 - r. Pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - s. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - t. Pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
 - u. Pengelolaan terminal tipe C; dan
 - v. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
-

Kepala Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tugas dan Fungsi :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penetapan rencana induk perkeretaapian, jaringan jalur keretaapi yang jaringannya dalam 1 daerah dan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian, penyediaan perlengkapan jalan, rekayasa lalu lintas untuk jalan, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam daerah, penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan, penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan Kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur keretaapi khusus yang jaringannya dalam daerah.

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tugas dan Fungsi :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan dan / atau jaringan jalur keretaapi dan untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang – orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek

d

a
lam daerah, penetapan tariff angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan operasional, penindakan serta bimbingan keselamatan.

4. Kepala Bidang Operasional

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan operasional, penindakan serta bimbingan keselamatan, dengan fungsi sebagaimana berikut;

- a. Pelaksanaan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- b. Pelaksanaan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- c. Pelaksanaan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- d. Pelaksanaan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- e. Pelaksanaan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. Pelaksanaan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- h. P
elaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landasan helikopter;

- i. Pelaksanaan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 daerah serta penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur keretaapi daerah;
- j. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan kabupaten, laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana;
- k. Pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- m. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- n. Pelaksanaan pemanduan moda;
- o. Pelaksanaan pengembangan teknologi perhubungan; dan
- p. Pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Operasional

Tugas dan Fungsi :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan penerbitan izin bangunan, pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin usaha dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 daerah, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur keretaapi daerah serta pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana.

Kepala Seksi Penindakan

Tugas dan Fungsi :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan

Tugas dan Fungsi :

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan serta pengembangan lingkungan perhubungan.

2. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 1 Tahun pada Tahun 2024d ibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja untuk disempurnakankembali dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut ;

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aspek strategis, kegiatan dan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

BAB 11 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program, kinerja lainnya serta akuntabilitas keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

BAB 1V PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta langkah – langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6) serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas Perhubungan telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa yang akan datang, yang merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang ada di

D

inas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu "**Mewujudkan Sistem Transportasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tertib, aman, lancar dan handal yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri**".

Visi diatas disusun dengan mengacu visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mempertimbangkan adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang handal yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkanlah 5 misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu;

1. Membangun sarana prasarana yang mendukung transportasi;
2. Melaksanakan pelayanan, pengawasan dan penertiban operasional angkutan;
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha di bidang transportasi;
4. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana dan pengaturan keselamatan transportasi;
5. Mengintensifkan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran pengguna lalu lintas angkutan darat dan sungai.

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan **tujuan strategis**, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan tujuannya. Dengan demikian tujuan strategis harus dirumuskan terlebih dahulu karena akan dapat secara tepat dan cepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan ini juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Adapun **tujuan strategis** Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah;

1. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dan air;
2. Meningkatnya PAD;dan
3. Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Terkait dengan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan **sasaran strategis**, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan t

erukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*).

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap – tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan tahun 2021– 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut;

Tujuan 1 :

“ Meningkatkan keselamatan transportasi darat dan air”.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Peningkatan KeselamatanTransportasi Darat Dan Air	1. Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Darat; 2. Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Air.

Tujuan 2 :

“ Meningkatkan PAD”.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Ratio PAD Sektor Perhubungan Terhadap Total PAD.
Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Perlengkapan Jalan;2. Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik.

Tujuan 3 :

“ Meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan”.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
----------------	--------------------------

Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);2. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP);3. Laporan Keuangan Sesuai SAP.
--	--

B. Penetapan / Perjanjian Kerja Tahun 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026.

Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a. Perjanjian Kinerja Eselon II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dan Air	1	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Darat	20,00%	20,00%
		2	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Air	50,00%	50,00%
2	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	1	Ratio PAD Sektor Perhubungan Terhadap Total PAD	0,67%	0,043%
3	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	74	74
		2	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	B
		3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Penunjang Pemerintahan Kabupaten / Kota Urusan Daerah	5.370.334.143,00	4.855.503.211,00
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	147.380.000,00	146.809.200,00
3	Pengelolaan Pelayaran	460.000.000,00	457.700.050,00

	TOTAL (1 + 2 + 3)	5.977.714.143,00	5.460.012.461,00
--	----------------------------	-------------------------	-------------------------

B. Perjanjian Kinerja Eselon III

- Sekretaris Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Daerah	Indeks Pelayanan Instansi	88	88
		Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tepatwaktu	Tepat Waktu
		Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
-----------	----------------	--------------------	-------------------------

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.370.334.143,00	4.855.503.211,00
	TOTAL	5.370.334.143,00	4.855.503.211,00

- **Kabid Operasional**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	1 PersentasePerlengkapan Jalan	6,00%	6,00%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		
A	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	77.380.000,00	77.217.200,00
TOTAL		77.380.000,00	77.217.200,00

- **Kabid Lalu Lintas dan Angkutan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	1 Persentase Perlengkapan Jalan	6,00%	6,00%
		2 Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik	35,2%	49,6%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		
A	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota	70.000.000,00	69.592.000,00
2	Program Pengelolaan Pelayaran		

B	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	460.000.000,00	457.700.050,00
TOTAL		530.000.000,00	527.292.050,00

c. Perjanjian Kinerja Eselon IV

-Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
-----------	-----------------	--------------------	-------------------------

1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.000.000,00	83.920.000,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.000.000,00	80.460.000,00

--	--	--	--

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.220.803,00	389.323.765,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.400.000,00	85.313.206,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	627.561.150,00	545.165.200,00
T O T A L		1.375.181.953,00	1.184.182.161,00

Kasubbag Program Dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
----	-------------------	-------------------------	--------	-----------

1	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dan Administrasi Keuangan	Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%	100%

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.545.600,00	21.457.600,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.973.606.590,00	3.649.863.440,00
T O T A L		3.995.152.190,00	3.671.321.040,00

- **Kasi Pengendalian & Pengawasan Operasional**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
-----------	--------------------------	--------------------------------	---------------	------------------

1	Terwujudnya Angkutan Yang Tertib Dan Teratur Pada Hari Raya Besar, Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal Dan Tahun Baru	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Posko Di Berbagai Titik Jalan	12 Hari	12 Hari
---	---	---	---------	---------

2	Terwujudnya Pengawasan, Inventarisasi / Survey Pengamanan Dan Pengaturan LLAJ	Jumlah Pengawasan Dan Pengaturan LLAJ, Kawasan Tertib Lalu Lintas	12 Bulan	12 Bulan
---	---	---	----------	----------

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	22.380.000,00	22.247.200,00
2	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	55.000.000,00	54.970.000,00
T O T A L		77.380.000,00	77.217.200,00

- **K**
asi Penindakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
----	-------------------	-------------------------	--------	-----------

1	Terciptanya Arus Lalu Lintas Yang Kondusif, Aman Dan Teratur	Jumlah Sosialisasi Angkutan Barang Dan Penegakan Hukum	8 Hari	8 Hari
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal Dan Tahun Baru	Jumlah Pelaksanaan Pam Posko Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan	12 Hari	12 Hari

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	22.380.000,00	22.247.200,00
2	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	55.000.000,00	54.970.000,00
T O T A L		77.380.000,00	77.217.200,00

- **K**
a
si Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
----	-------------------	-------------------------	--------	-----------

1	Terciptanya Lalu Lintas Angkutan Orang Dan Barang Yang Kondusif	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Jalan	2 Unit	2 Unit
---	---	-------------------------------------	--------	--------

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PenyediaanPerlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota	70.000.000,00	69.592.000,00
T O T A L		70.000.000,00	69.592.000,00

- **Kasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Sarana Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	100%	100%

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
----	----------	-------------	------------------

1	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	460.000.000,00	457.700.050,00
T O T A L		460.000.000,00	457.700.050,00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari aspek keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian dihitung dengan rumus semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Perhubungan menetapkan 1 sasaran yang disajikan pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1
Sasaran Dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024
-------------------	-------------------	-------------	----------------

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dan Air	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Darat	20,00%	20,00%
	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Air	50,00%	50,00%

Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Ratio PAD Sektor Perhubungan Terhadap Total PAD	0,67%	0,043%
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Nilai IKM	74	74
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	B
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai

Adapun perbandingan Data Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.2** berikut ini;

Tabel 3.2
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2022 – 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dan Air	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Darat	0,05%	6,66%	13,33%	13,33%	20,00%	20,00%

		Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Air	0,05%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
2	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Ratio PAD Sektor Perhubungan Terhadap Total PAD	0,71%	0,0019%	0,69%	0,056%	0,67%	0,043%
3	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan	6,00%	100,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
		Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik	34,8	49,6%	35,00%	49,6%	35,2%	49,6%
4	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilit as Kinerja Dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	72	72	73	73	74	74
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB	CC	BB	B	BB	B
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada target Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena;

1. Tidak dibenarkannya penarikan retribusi di luar fasilitas yang dimiliki oleh instansi pemungut;

2. Minimnya kunjungan kapal;

3. A _____ danya dermaga yang rusak, sehingga operasional dermaga tidak bisa berjalan secara maksimal.

Adapun perbandingan antara capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2023 dapat tergambar dari Tabel 3.3 di bawah ini;

Tabel 3.3
Perbandingan Ratio PAD Sektor Perhubungan

**Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dan Dinas Perhubungan Kota Jambi
Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dishub Kota 2023	Dishub Kab. Tanjab Timur 2023
1	Peningkatan PAD Di Sektor Perhubungan	Ratio PAD Sektor Perhubungan Terhadap Total PAD	26,97%	0,056%

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 4 sasaran program dengan 8 indikator kinerja program yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Realisasi dan capaian kinerja untuk masing – masing kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023serta akhir periode Renstra adalah sebagai berikut;

“ Sasaran Program 1

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah;

1. Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Darat

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar **20,00%** dari target **20,00%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar **13,33%** dari target **13,33%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 6,66% dari target **0,05%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

2. P
e

ersentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Air

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar **50,00%** dari target **50,00%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar **50,00%** dari target **50,00%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar **50,00%** dari target **0,05%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

“ Sasaran Program 2

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah;

1. Ratio PAD Sektor Perhubungan Terhadap Total PAD

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar **0,043%** dari target **0,67%** atau sebesar **6,41%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar **0,056%** dari target **0,69%** atau sebesar **8,11%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar **0,0019%** dari target **0,71%** atau sebesar **0,26 %** dari target yang telah ditetapkan

“ Sasaran Program 3

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah;

1. Persentase Perlengkapan Jalan

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar **100,00%** dari target **6,00%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar **100,00%** dari target **6,00%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

R

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar **100,00%** dari target **6,00%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

2. Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar **49,6%** dari target **35,2%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar **49,6%** dari target **35,00%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar **49,6%** dari target **34,8%** atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan

“ Sasaran Program 4

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah;

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 74 dari target 74 atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 73 dari target 73 atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 72 dari target 72 atau sebesar **100,00%** dari target yang telah ditetapkan.

2. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Realisasi kinerja tahun 2024 adalah B dari target BB

Realisasi kinerja tahun 2023 adalah B dari target BB

Realisasi kinerja tahun 2022 adalah CC dari target BB

3. Laporan Keuangan Sesuai SAP

Realisasi kinerja tahun 2024 sesuai

Realisasi kinerja tahun 2023 sesuai

Realisasi kinerja tahun 2022 sesuai

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa ada beberapa target kinerja yang belum mencapai hasil maksimal. Hal ini disebabkan antara lain;

1. Keterbatasan anggaran di tahun 2024 menyebabkan beberapa usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan darat dan laut belum bisa terakomodir sehingga pencapaian hasil dari masing – masing program belum maksimal;
2. Minimnya ketersediaan sarana prasarana baik di kantor dinas maupun fasilitas pada pos pengawasan LLAJ dan LLASDP sebagai ujung tombak pelayanan jasa retribusi yang berdampak terhadap penerimaan daerah;
3. Minimnya personil dan SDM yang melaksanakan tupoksi dinas baik administrasi maupun operasional sebagai tenaga teknis khusus bidang LLAJ dan ASDP.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan langkah – langkah sebagai berikut;

1. Mengusulkan penambahan anggaran pada Rencana Kegiatan Anggaran tahun selanjutnya sehingga program dan kegiatan yang dianggap strategis dapat terakomodir;
2. Adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas;
3. Penambahan personil yang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang teknis;
4. Terus dilakukannya koordinasi dengan Perhubungan Propinsi, Balai dan Kementerian Perhubungan terkait usulan pembangunan; dan
5. Terus diupayakannya peningkatan kualitas SDM Perhubungan yang berkualifikasi teknis perhubungan melalui diklat / pelatihan / kursus dengan mengalokasikan belanja diklat / pelatihan / kursus di dalam anggaran dinas.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Demi menunjang terlaksananya RPJMD Kabupaten dan Renstra 2021 - 2026, maka Dinas Perhubungan memiliki 3 (Tiga) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebagai berikut;

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	0%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	90,41	5.370.334.143,00	4.855.503.211,00	514.830.932,00
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,84	105.545.600,00	105.377.600,00	168.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	99,07	4.730.000,00	4.686.000,00	44.000,00

	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD		Jumlah Dokumen RKA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	99,33	1.200.000,00	1.192.000,00	8.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	99,67	1.200.000,00	1.196.000,00	4.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD		Jumlah Dokumen DPA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	99,67	1.200.000,00	1.196.000,00	4.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	99,67	1.200.000,00	1.196.000,00	4.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99,80	12.015.600,00	11.991.600,00	24.000,00

	Evaluasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,90	84.000.000,00	83.920.000,00	80.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	91,85	3.973.606.590,00	3.649.863.440,00	323.743.150,00
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	90,60	2.868.086.590,00	2.598.583.440,00	269.503.150,00

	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	95,09	1.105.520.000,00	1.051.280.000,00	54.240.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Daerah	72,49	111.000.000,00	80.460.000,00	540.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99,33	81.000.000,00	80.460.000,00	540.000,00
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,91	423.220.803,00	389.323.765,00	33.897.038,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	98,65	34.783.500,00	34.314.000,00	469.500,00

	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	77,92	146.977.382,00	114.530.900,00	32.446.482,00
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	98,34	45.889.821,00	45.126.000,00	763.821,00

	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan Yang Disediakan	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	99,83	9.600.000,00	9.584.000,00	16.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	99,89	181.170.100,00	180.968.865,00	201.235,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65,93	129.400.000,00	85.313.206,00	44.086.794,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	64,16	123.000.000,00	78.913.206,00	44.086.794,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	86,87	627.561.150,00	545.165.200,00	82.395.950,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	89,71	352.561.150,00	316.274.200,00	36.286.950,00

	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	83,23	275.000.000,00	228.891.000,00	46.109.000,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan	99,61	147.380.000,00	146.809.200,00	570.800,00

	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	99,42	70.000.000,00	69.592.000,00	408.000,00
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	99,42	70.000.000,00	69.592.000,00	408.000,00
	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	99,79	77.380.000,00	77.217.200,00	162.800,00
	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Laporan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	99,41	22.380.000,00	22.247.200,00	132.800,00
	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	99,95	55.000.000,00	54.970.000,00	30.000,00

3	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik	99,50	460.000.000,00	457.700.050,00	2.299.950,00
	Pembangunan Dan Penerbitan		Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan	99,50	460.000.000,00	457.700.050,00	2.299.950,00

	Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau				
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	99,51	407.500.000,00	405.520.050,00	1.979.950,00
	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Beroperasi Dan Terpelihara	98,80	15.000.000,00	14.820.000,00	180.000,00
	Pengawasan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Laopran Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	99,63	37.500.000,00	37.360.000,00	140.000,00
	JUMLAH			91,34	5.977.714.143,00	5.460.012.461,00	517.701.682,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian kinerja dikalikan 100. Ada beberapa kegiatan yang menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya, seperti tergambar dalam tabel berikut ini;

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 (%)	TINGKAT EFISIENSI
----	--------------------	---------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	100,00	90,41	9,59
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	99,84	0,16
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	100,00	99,07	0,93
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD		Jumlah Dokumen RKA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	100,00	99,33	0,67
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	100,00	99,67	0,33
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD		Jumlah Dokumen DPA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	100,00	99,67	0,33
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	100,00	99,67	0,33
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	99,80	0,20

	Evaluasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	99,90	0,10
--	-----------------------	--	--	--------	-------	------

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	93,11	91,85	1,26
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	86,21	90,60	-4,39
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	100,00	95,09	4,91
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Daerah	50,00	72,49	-22,49
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00	99,33	0,67
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	99,91	0,09
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100,00	98,65	1,35

	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100,00	77,92	22,08
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	100,00	98,34	1,66
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan Yang Disediakan	100,00	100,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00	99,83	0,17
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100,00	99,89	0,11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	65,93	34,07
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100,00	64,16	35,84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98,00	86,87	11,13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	100,00	89,71	10,29

	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	96,00	83,23	12,77
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan	100,00	99,61	0,39
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	100,00	99,42	0,58
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	100,00	99,42	0,58
	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	100,00	99,79	0,21
	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Laporan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	100,00	99,41	0,59
	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	100,00	99,95	0,05

3	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik	100,00	99,50	0,50
	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	100,00	99,50	0,50
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	100,00	99,51	0,49
	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Beroperasi Dan Terpelihara	100,00	98,80	1,20
	Pengawasan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Laopran Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	100,00	99,63	0,37

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur

Dari tabel di atas tergambar jelas sebagian besar sub kegiatan belanja mengalami efisiensi sumberdaya yang nilainya bervariasi. Hal ini disebabkan karena semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelola anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

D. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan dari masyarakat yang harus terpenuhi dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa akuntabilitas keuangan dan aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan tapi dituntut juga untuk mempertanggungjawabkan atas hasil – hasil yang dicapai. Berikut di bawah ini Tabel pengalokasian anggaran dan belanja serta efisiensi anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	88	88	100	5.370.334.143,00	4.855.503.211,00	90,41	514.830.932,00
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100	105.545.600,00	105.377.600,00	99,84	168.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dok	4 Dok	100	4.730.000,00	4.686.000,00	99,07	44.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD		Jumlah Dokumen RKA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	1 Dok	1 Dok	100	1.200.000,00	1.192.000,00	99,33	8.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	1 Dok	1 Dok	100	100	1.196.000,00	99,67	4.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD		Jumlah Dokumen DPA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1 Dok	100	100	1.196.000,00	99,67	4.000,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA – SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	1 Dok	100	100	1.196.000,00	99,67	4.000,00

Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok	100	12.015.600,00	11.991.600,00	99,80	24.000,00
Evaluasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	100	84.000.000,00	83.920.000,00	99,90	80.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100,00 %	100,00%	93,11	3.973.606.590,00	3.649.863.440,00	91,85	323.743.150,00
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	29 org/bln	25 org/bln	86,21	2.868.086.590,00	2.598.583.440,00	90,60	269.503.150,00
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	12 Dok	12 Dok	100	1.105.520.000,00	1.051.280.000,00	95,09	54.240.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Daerah	100,00 %	50,00%	50,00	111.000.000,00	80.460.000,00	72,49	540.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	108 Paket	108 Paket	100,00	81.000.000,00	80.460.000,00	99,33	540.000,00
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	3 Org	0 Org	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %	100,00%	100,00	423.220.803,00	389.323.765,00	99,91	33.897.038,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	34.783.500,00	34.314.000,00	98,65	469.500,00

	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	146.977.382,00	114.530.900,00	77,92	32.446.482,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100,00	45.889.821,00	45.126.000,00	98,34	763.821,00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan Yang Disediakan	1 Dok	1 Dok	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	100,00	9.600.000,00	9.584.000,00	99,83	16.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	100,00	181.170.100,00	180.968.865,00	99,89	201.235,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100	129.400.000,00	85.313.206,00	65,93	44.086.794,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Lap	12 Lap	100,00	123.000.000,00	78.913.206,00	64,16	44.086.794,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	98,00	98,00	627.561.150,00	545.165.200,00	86,87	82.395.950,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	100,00	352.561.150,00	316.274.200,00	89,71	36.286.950,00

	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	25 Unit	24 Unit	96,00	275.000.000,00	228.891.000,00	83,23	46.109.000,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan	6,00%	6,00%	100,00	147.380.000,00	146.809.200,00	99,61	570.800,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	100,00%	100,00%	100,00	70.000.000,00	69.592.000,00	99,42	408.000,00
	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	100,00	70.000.000,00	69.592.000,00	99,42	408.000,00
	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	100,00%	100,00%	100,00	77.380.000,00	77.217.200,00	99,79	162.800,00
	Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Laporan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	1 Lap	1 Lap	100,00	22.380.000,00	22.247.200,00	99,41	132.800,00
	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	1 Lap	1 Lap	100,00	55.000.000,00	54.970.000,00	99,95	30.000,00

3	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase Dermaga Dalam Kondisi Baik	35,2%	49,6%	100,00	460.000.000,00	457.700.050,00	99,50	2.299.950,00
	Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Persentase Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	100,00 %	100,00%	100,00	460.000.000,00	457.700.050,00	99,50	2.299.950,00
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	1 Dok	1 Dok	100,00	407.500.000,00	405.520.050,00	99,51	1.979.950,00
	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Beroperasi Dan Terpelihara	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan	100,00	15.000.000,00	14.820.000,00	98,80	180.000,00
	Pengawasan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau		Jumlah Laopran Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	1 Lap	1 Lap	100,00	37.500.000,00	37.360.000,00	99,63	140.000,00
	J U M L A H						5.977.714.143,00	5.460.012.461,00	91,34	517.701.682,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan RPJMD Tanjung Jabung Timur 2021 - 2026.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 ini dapat menggambarkan Kinerja Dinas Perhubungan dan

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran. Selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Adapun hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 2 sasaran strategis yang masing – masing sasaran mempunyai 2 indikator sasaran dan 1 indikator sasaran, dimana ke – 2 indikator sasaran sudah tercapai dengan kategori baik.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain;
 - a. Keterbatasan anggaran di tahun 2024 menyebabkan beberapa usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan darat dan laut belum bisa terakomodir sehingga pencapaian hasil dari masing – masing program belum maksimal;
 - b. Minimnya ketersediaan sarana prasarana baik di kantor dinas maupun fasilitas pada pos pengawasan LLAJ dan LLASDP sebagai ujung tombak pelayanan jasa retribusi yang berdampak terhadap penerimaan daerah;
 - c. Minimnya personil dan SDM yang melaksanakan tupoksi dinas baik administrasi maupun operasional sebagai tenaga teknis khusus bidang LLAJ dan ASDP.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Adapun langkah – langkah perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pencapaian kinerja yang lebih baik adalah sebagai berikut;

- a. Peningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan;
-

- b. Peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan publik di bidang Perhubungan;
 - c. Peningkatan keselamatan di jalan Kabupaten dengan pengadaan fasilitas keselamatan yang sesuai standar;
 - d. Terus diupayakannya koordinasi sinergitas, kerjasama dan dukungan instansi lainnya, antara;
 - 1. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, berkaitan dengan sinkronisasi program kerja Perhubungan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - 2. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terkait pembinaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait pengembangan kelembagaan tata laksana dan akuntabilitas SKPD.
 - e. Terus diupayakannya Peningkatan kualitas laporan kinerja dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tercapai / tidak tercapainya kinerja organisasi serta upaya – upaya untuk meminimalisirnya / mengatasinya .
 - f. Secara Kontinyu akan melaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan yang meliputi target kinerja, realisasi kinerja (penyerapan anggaran, terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan dan capaian kinerja outcome yang diperjanjikan), faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi yang dilengkapi dengan notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi per triwulan.
-

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan kepada pihak – pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak – pihak lainnya sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pembangunan di sektor perhubungan yang menunjang sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dalam peningkatan infrastruktur dan bermanfaat dalam upaya pengembangan di bidang perhubungan serta menjadi pedoman dalam perencanaan kinerja dan anggaran di masa yang akan datang.

Muara Sabak, Desember 2024

KEPALA DINAS

IRWANTO, S. Sos

Pembina Utama Muda / IV. C

NIP. 19701125 198912 1 001